

PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA

Ari Mulianta Ginting *

Rasbin **

Abstract

In the year 1970-1996 the Indonesian population of poor is reduced, but the monetary crisis in 1997 led to increasing Indonesia's poor population and declining economic growth. The purpose of this study to analyze the economic growth that influence poverty in Indonesia. In a regression analysis of time series methods in the year 1990 till 2008, this study tried to analyze the effect of economic growth and other supporters of variabel-variabel, namely, government expenditure and the amount of unemployment on poverty levels in Indonesia. In this study the authors found the results quite interesting. Based on estimated results found that significant positive relationship between GDP last year and poverty rate in Indonesia there are negative and significant relationship between government expenditure (GE) with the level of poverty in Indonesia. Therefore, government expenditure (GE) should be increased because it is associated with a reduction in poverty levels in Indonesia.

Kata Kunci: Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multi dimensi dan lintas sektoral yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, antara lain : tingkat pendapatan, kesehatan, pendidikan, akses terhadap barang dan jasa, lokasi, geografis, gender, dan kondisi lingkungan.

* Penulis adalah kandidat peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dengan email : arigins2@gmail.com

** Penulis adalah kandidat peneliti bidang ekonomi dan kebijakan publik pada Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi Setjen DPR RI dengan email : ras9bin@gmail.com

Kemiskinan dapat menunjukkan pada kondisi individu, kelompok, maupun situasi kolektif masyarakat. Kemiskinan yang bersifat missal dan parah pada umumnya terdapat di negara berkembang. Namun, terdapat bukti bahwa kemiskinan juga hadir di negara maju. Di negara-negara berkembang, kemiskinan sangat terkait dengan aspek struktural. Misalnya, akibat sistem ekonomi yang tidak adil, merajalelanya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), adanya diskriminasi sosial, atau tidak adanya jaminan sosial.

Kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor. Jarang ditemukan kemiskinan hanya disebabkan oleh faktor tunggal. Seseorang atau keluarga miskin biasanya disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait satu sama lain, seperti mengalami kecacatan, memiliki pendidikan rendah, tidak memiliki modal atau keterampilan untuk berusaha, tidak tersedianya kesempatan kerja, terkena pemutusan hubungan kerja, tidak adanya jaminan sosial dan hidup di lokasi terpencil.

Kemiskinan bisa disebabkan oleh empat faktor¹, yaitu :

1. Faktor individual. Terkait dengan aspek patologi, termasuk kondisi fisik dan psikologi si miskin. Orang miskin disebabkan oleh perilaku, pilihan atau kemampuan dari si miskin itu sendiri dalam menghadapi kehidupannya.
2. Faktor sosial. Kondisi sosial yang menjebak seseorang menjadi miskin. Misalnya, diskriminasi berdasarkan usia, sosial, gender, etnis yang menyebabkan seseorang menjadi miskin.
3. Faktor kultural. Kondisi atau kaulitas budaya yang menyebabkan kemiskinan. Faktor ini secara khusus sering menunjuk pada konsep "kemiskinan kultural" atau "budaya kemiskinan" yang menghubungkan kemiskinan dengan kebiasaan hidup atau mentalitas. Sikap-sikap negatif seperti malas, *fatalism* atau menyerah pada nasib, tidak memiliki jiwa wirausaha, dan kurang menghormati etos kerja, misalnya sering ditemukan pada orang-orang miskin.

¹ Suhartono, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

4. Faktor struktural. Menunjuk pada struktur atau sistem yang tidak adil, tidak sensitif dan *unaccessible* sehingga menyebabkan seseorang atau kelompok orang menjadi miskin. Sebagai contoh, sistem ekonomi neoliberalisme yang diterapkan di Indonesia telah menyebabkan petani, nelayan dan pekerja sektor informal terjerat oleh dan sulit keluar dari kemiskinan. Sebaliknya stimulus ekonomi, pajak, iklim investasi lebih menguntungkan orang kaya dan pemodal asing untuk terus menumpuk kekayaan.

Sementara itu menyusul lahirnya Deklarasi Milenium Bangsa-Bangsa, yang secara jelas menyebutkan tujuan-tujuan Millenium Development Goals (MDG). Tujuan itu adalah bahwa pada tahun 2015, 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen diantaranya untuk:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan; dan
2. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan.

B. Permasalahan

Belakangan ini diskusi lama tentang pertumbuhan dan kemiskinan dimunculkan kembali. Ini bermula di DPR saat Susilo Bambang Yudhoyono pada 16 Agustus 2006 yang menyebutkan penurunan angka kemiskinan dari 23,4% (1999) menjadi 16% (2005). Wakil Presiden Yusuf Kalla juga menegaskan kemiskinan pasti turun jika pertumbuhan semakin baik. Hal ini didasari bahwa tingkat pertumbuhan GDP akan menetes dengan sendirinya sehingga akan menciptakan lapangan kerja dan berbagai peluang ekonomi lain, yang pada akhirnya akan menumbuhkan berbagai kondisi yang diperlukan demi terciptanya distribusi hasil pertumbuhan ekonomi dan sosial secara lebih merata. Prinsip ini dikenal sebagai *trickle down effect*. Selain pemerintah juga menyakini bahwa kemiskinan terjadi karena tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah sebagaimana terjadi pada masa krisis moneter 1997. Namun, sejumlah pengamat meragukannya. Pasalnya, 16% bukanlah angka terbaru paska kenaikan harga BBM. Selain itu, angka perbandingan lainnya yaitu penerima bantuan langsung tunai (BLT) dan beras raskin juga menunjukkan bahwa kemiskinan tak menyusut. Jadi pertumbuhan 5-6% belakangan ini tidak punya dampak serius bagi penciutan angka kemiskinan.

Ada dua kesimpulan yang bertolak belakang terhadap soal ini, yakni apakah pertumbuhan berjalan searah atau berlawanan dengan kemiskinan? atau apakah pertumbuhan ekonomi sekarang ini yang telah membaik dibandingkan kondisi pada masa krisis moneter berpihak pada kaum miskin atau tidak. Tingkat pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan berpihak pada kaum miskin jika peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Akan lebih baik lagi jika pertumbuhan ekonomi meningkat 1% dapat menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 1%. Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba menganalisa pengaruh tingkat pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Indonesia. Adapun model yang digunakan adalah model yang telah dikembangkan oleh Iradian (2005).

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memperlihatkan tingkat kemiskinan di Indonesia tahun 1990-2008. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kaitan antara pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan di Indonesia khususnya tujuannya secara nasional, yaitu:

- a. menganalisis pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan;
- b. menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap tingkat kemiskinan; dan
- c. menganalisis pengaruh tingkat pengangguran terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

D. Manfaat penelitian

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi untuk merancang pengembangan ekonomi di berbagai daerah bahkan dapat membangun model pertumbuhan ekonomi daerah. Ini juga berguna dalam mendukung program desentralisasi fiskal dan program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

II. Kerangka Pemikiran

A. Tinjauan Pustaka

1. Kemiskinan

1.1. Definisi Kemiskinan

Pendapat para ahli atau lembaga internasional mengenai definisi kemiskinan beragam. Menurut Basri, kemiskinan sebagai akibat dari ketiadaan demokrasi, yang mencerminkan hubungan kekuasaan yang menghilangkan kemampuan warga untuk memutuskan masalah yang menjadi perhatian mereka sendiri, sehingga mayoritas penduduk kurang memperoleh alat-alat produksi (lahan dan teknologi) dan sumber daya (pendidikan, kredit, dan akses pasar)².

Sementara itu, menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Maksud dari definisi tersebut adalah membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan (GK) atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan.

Berbeda dengan BPS, menurut Cahyat (2004), Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) melihat definisi kemiskinan dari sisi kesejahteraan dibandingkan dari sisi kemiskinan yakni ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan sosial psikologis³. United Nation Development Program (UNDP) dalam Cahyat (2004) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik sebagai salah satu indikator kemiskinan⁴.

Dengan menggunakan perspektif yang lebih luas lagi, David Cox (2004: 1-6) membagi kemiskinan ke dalam beberapa dimensi, antara lain:

² Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia-Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta

³ Cahyat, Ade, 2000, *Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia)*, Center for International Forestry Research

⁴ Ibid

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi melahirkan negara pemenang dan negara kalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang sering kali terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi.
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang disebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak dan kelompok minoritas akibat kondisi sosial yang tidak menguntungkan mereka, seperti gender, diskriminasi atau eksploitasi ekonomi.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan dan tingginya jumlah penduduk.

Pada dasarnya definisi kemiskinan tersebut dapat dilihat dari dua sisi yaitu (1) kemiskinan absolut, (2) kemiskinan relatif.

1.2. Kemiskinan Absolut

Menurut konsep ini, kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yaitu makanan, pakaian dan perumahan agar dapat menjamin kelangsungan hidupnya⁵.

⁵ Todaro, M. P., 2000, *Economic Development*, Six Edition, Harlow : Addition-Wesley

1.3. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif, menurut Miller dalam Kuncoro (2003), orang yang sudah mempunyai tingkat pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum tidak selalu berarti miskin. Walaupun pendapatan sudah mencapai tingkat kebutuhan dasar minimum, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan keadaan masyarakat sekitarnya maka orang tersebut masih berada dalam keadaan miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari pada lingkungan yang bersangkutan⁶.

Menurut konsep ini, garis kemiskinan akan berubah bila tingkat hidup masyarakat berubah. Hal ini berarti konsep kemiskinan relatif bersifat dinamis sehingga kemiskinan akan selalu ada. Oleh karena itu, beberapa peneliti melihat kemiskinan dari berbagai aspek ketimpangan sosial. Semakin besar ketimpangan antara tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat kaitannya dengan masalah distribusi pendapatan.

Dari penjelasan-penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa menurut Sumanta (2005) definisi kemiskinan harus mencakup: (1) ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar; (2) tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi); (3) tidak adanya jaminan masa depan (4) rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam; (5) tidak dilibatkan dalam kegiatan sosial masyarakat; (6) tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan; (7) ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental; (8) ketidakmampuan dan ketidak-beruntungan sosial; (anak terlantar, wanita korban kekerasan, janda miskin, kelompok marginal dan terpencil.)⁷

⁶ Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan –Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta

⁷ Sumanta, Jaka, 2005, *Fenomena Lingkaran Kemiskinan Indonesia- Analisis Ekonometri Regional Dana Panel Propinsi Tahun 1999-2002*, Tesis Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, UI, Depok

1.4. Garis Kemiskinan

Dalam menghitung tingkat kemiskinan dalam suatu daerah dimulai dengan menggambarkan sebuah garis kemiskinan. Idealnya, garis ini mendefinisikan sebagai pendapatan perkapita rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan perkapita di bawah garis kemiskinan dapat dikatakan miskin, sementara mereka yang mempunyai pendapatan di atas garis kemiskinan dapat dikatakan tidak miskin.

Garis kemiskinan (GK) digunakan dan ditetapkan oleh BPS untuk menghitung jumlah penduduk dan rumah tangga miskin. GK didapatkan dari hasil survei modul konsumsi Bapenas yang ditetapkan dalam rupiah per orang per bulan.

1.5. Pengukuran Kemiskinan

Menurut Cahyat (2004) pada awal tahun 1970an, indikator kemiskinan diukur dengan menggunakan tingkat konsumsi ekuivalen beras per kapita sebagai indikator kemiskinan. Pengukuran dibuat perbedaan antara tingkat ekuivalen di daerah pedesaan dan perkotaan. Untuk pedesaan, apabila seseorang hanya mengkonsumsi ekuivalen 240 kg per orang per tahun, maka yang bersangkutan digolongkan sangat miskin, sedangkan untuk daerah perkotaan ditentukan sebesar ekuivalen 360 kg beras per tahun. Pendekatan Sajogyo ini memiliki kelemahan mendasar yaitu tidak mempertimbangkan perkembangan tingkat biaya riil.

Sementara itu BPS menghitung angka kemiskinan lewat dua pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar dan pendekatan *Head Account Index*. Pendekatan yang pertama merupakan pendekatan yang sering digunakan dan mengartikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. *Head Account Index* merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut. Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan yang merupakan nilai rupiah dari kebutuhan minimum makanan dan non makanan, yaitu tidak hanya terbatas pada sandang dan papan melainkan termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebutuhan minimum makanan BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan jumlah beras tetapi termasuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi kebutuhan minimum makanan BPS tidak menyetarakan kebutuhan-kebutuhan dasar dengan

jumlah beras tetapi dengan menggunakan indikator yang merekomendasikan oleh Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1998 yaitu 2.100 kalori per orang per hari.

BPS pertama kali melaporkan penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin pada tahun 1984. Pada saat, penghitungan jumlah dan persentase penduduk miskin mencakup periode 1976-1981 dengan menggunakan modul konsumsi Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Sejak tahun 1981, setiap tiga tahun sekali, dengan data modul konsumsi Susenas, BPS secara rutin mengeluarkan data jumlah dan persentase penduduk miskin hanya disajikan untuk tingkat nasional yang dipisahkan menurut perkotaan dan pedesaan. Selanjutnya sejak tahun 1993 informasi mengenai jumlah dan persentase penduduk miskin disajikan untuk seluruh propinsi.

2. Pertumbuhan Ekonomi

2.1. Pertumbuhan Ekonomi

★ Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Selanjutnya, perekonomian dianggap mengalami pertumbuhan apabila seluruh balas jasa riil terhadap penggunaan faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Dengan kata lain, perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil.

2.2. Teori Pertumbuhan

2.2.1. Teori Pertumbuhan Pembangunan Lewis

Teori ini memusatkan perhatiannya pada transformasi struktural suatu perekonomian subsistem yang dirumuskan oleh W. Arthur Lewis pada dekade 1950an yang kemudian dikembangkan oleh Jhon Fei dan Gustav Ranis. Model dua sektor ini diakui sebagai teori umum yang membahas proses pembangunan di negara-negara dunia ketiga yang mengalami kelebihan penawaran tenaga kerja selama dekade 1960an dan awal dekade 1970.

Menurut teori pembangunan ini, perekonomian yang terdiri dari dua sektor, yaitu: *pertama* sektor tradisional, yaitu sektor pedesaan subsistem yang kelebihan penduduk dan ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Hal ini ditandai dengan produktivitas marginal tenaga kerja sama dengan nol. Hal ini memungkinkan Lewis untuk mendefinisikan kondisi surplus tenaga kerja sebagai suatu fakta bahwa jika sebagian tenaga kerja tersebut ditarik dari sektor pertanian, maka sektor itu tidak akan kehilangan outputnya dan *kedua* sektor industri perkotaan modern yang tingkat produktivitasnya tinggi dan menjadi tempat penampungan tenaga kerja yang ditransfer sedikit demi sedikit dari sektor subsistem⁸.

2.2.2. Teori pertumbuhan Neoklasikal

Model pertumbuhan neoklasikal Sollow merupakan pilar yang sangat memberikan kontribusi terhadap teori pertumbuhan neoklasikal. Model pertumbuhan Sollow ini berpegang pada konsep skala hasil yang terus berkurang dari input tenaga kerja dan modal jika keduanya dianalisis secara terpisah. Kemajuan teknologi ditetapkan sebagai faktor residu untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang. Tinggi rendahnya pertumbuhan itu sendiri oleh Sollow diasumsikan bersifat eksogen atau tidak dipengaruhi faktor-faktor lain.

⁸ W. Arthur Lewis, *Economic Development Life Unlimited Supplies of Labour*, Manchester School, 22 May 1980

Model pertumbuhan neoklasik Sollow memakai fungsi produksi agregat standar yakni;

$$Y = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$$

Dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja dan A adalah produktivitas tenaga kerja yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen. Simbol α menunjukkan elastisitas output terhadap modal.

Menurut teori pertumbuhan neoklasikal, pertumbuhan output selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor, yaitu kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal (melalui tabungan dan investasi) serta penyempurnaan teknologi.

2.2.3. Teori Pertumbuhan Endogen

Teori pertumbuhan endogen dijelaskan melalui model pertumbuhan endogen menurut Róomer. Model ini mengkaji akibat teknologi yang mungkin terbagi dalam proses industrialisasi.

Model ini dimulai dengan mengasumsikan bahwa proses pertumbuhan berasal dari tingkat perusahaan atau industri. Setiap industri memproduksi dengan skala hasil yang konstan, namun Róomer mengasumsikan bahwa cadangan modal (K) dalam keseluruhan perekonomian, secara positif mempengaruhi output pada tingkat industri, sehingga terdapat skala yang semakin meningkat pada tingkat perekonomian secara keseluruhan.

Cadangan modal setiap perusahaan adalah barang publik, seperti produktivitas tenaga kerja (A) dalam model Sollow yang akan berpengaruh terhadap perusahaan lain di dalam perekonomian.

2.2.4. Teori Harold Domar

Teori pertumbuhan Harrod Domar dikembangkan oleh dua orang ahli ekonomi sesudah Keynes, yaitu Evsey Domar dan R. F. Harrod. Harrod

Domar membangun model pertumbuhan berdasarkan pada teori keseimbangan kegiatan perekonomian yang dikemukakan oleh Keynes. Keynes menyatakan bahwa pembelanjaan agregat akan menentukan kegiatan tingkat kegiatan ekonomi, yaitu didalam perekonomian terdapat konsumsi rumah tangga dan investas perusahaan dan kedua faktor tersebut menentukan tingkat pendapatan nasional. Harold Domar kemudian menyatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru yang merupakan tambahan neto terhadap cadangan atau stok modal. Jika diasumsikan bahwa ada hubungan ekonomi langsung antara besarnya stok modal (K) dengan GNP total (Y), maka hal itu berarti bahwa setiap tambahan neto terhadap stok modal dalam bentuk investasi baru akan menghasilkan kenaikan arus output nasional atau GNP. Logika lain yang dapat diambil dari penelitian Harold Domar tersebut adalah bahwa agar bisa tumbuh dengan pesat maka setiap perekonomian haruslah menabung dan menginvestasikan sebanyak mungkin bagian dari GNPnya. Semakin banyak yang dapat ditabung dan kemudian diinvestasikan, maka laju pertumbuhan perekonomian itu akan semakin cepat.

3. Kemiskinan dan Faktor Utama dalam Pertumbuhan Ekonomi.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi. Yaitu: (1) akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru; (2) Pertumbuhan penduduk; dan (3)kemajuan teknologi.

Menurut Tadaro, akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan untuk memperbesar output dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan, dan bahan baku meningkatkan stok modal fisik suatu negara dan memungkinkan peningkatan output di masa mendatang. Investasi produktif yang bersifat langsung tersebut harus dilengkapi dengan berbagai investasi penunjang yaitu investasi infrastruktur sosial dan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan angkatan kerja dianggap sebagai salah satu faktor yang memacu pertumbuhan ekonomi.

Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah jumlah tenaga produktif sedangkan penduduk yang lebih besar berarti meningkatkan ukuran pasar domestik.

Kemajuan teknologi bagi kebanyakan ekonomi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi paling penting. Kemajuan teknologi terjadi karena ada perbaikan atas cara-cara sebelumnya.

Dalam kaitannya dengan kemiskinan diharapkan sumber-sumber pertumbuhan tersebut dapat menurunkan kemiskinan. Investasi dapat menurunkan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja, tidak hanya investasi swasta tetapi juga investasi publik atau pemerintah.

4. Penelitian terdahulu.

Studi Aradian (2005) terhadap kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi di dalam jurnalnya yang berjudul *inequality, poverty, and growth* mencoba membuktikan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan dan pengeluaran pemerintah, serta penurunan tingkat kemiskinan dengan menggunakan data panel dari berbagai negara. Hasil studi menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan tingkat elastisitas sebesar 0,30. Sedangkan peningkatan nilai koefisien gini dapat menaikkan tingkat kemiskinan dan meningkatkan rasio pengeluaran pemerintah.

Studi Datt, dan Ravallion meneliti pengaruh antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat produktivitas disektor pertanian, tingkat inflasi dan pengeluaran pemerintah dengan penurunan tingkat kemiskinan di India. Dalam penelitiannya mereka menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memberikan pengaruh yang lebih tinggi sehingga hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa strategi yang efektif untuk menurunkan kemiskinan adalah melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi⁹.

⁹ Datt, Gaurau, Martin Ravallian, 2002, *Is India's Economics is Leaving The Poor Behind*, Journal of Economics Prospective

III. Metodologi

1. Kerangka Pemikiran

Sebelum tahun 1970-an, tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita. Namun peningkatan perkapita tersebut tidak mendorong penurunan tingkat kemiskinan sehingga definisi pembangunan mengalami pergeseran. Suatu negara dikatakan mengalami pembangunan ekonomi jika pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan perkapita dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Hal ini didasari bahwa pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan menyebabkan permintaan akan tenaga kerja karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat merangsang investasi-investasi baru dan peningkatan upah dan dengan demikian mengurangi kemiskinan. Studi empiris juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan seperti yang dilakukan oleh Aradian (2005).

Begitu pula dengan teori pertumbuhan ekonomi yang kemukakan oleh Harold Domar yang menyatakan bahwa untuk memacu pertumbuhan ekonomi dibutuhkan investasi baru. Investasi baru tersebut berasal dari keuntungan perusahaan yang digunakan kembali untuk investasi, sehingga semakin meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan dapat menciptakan lapangan kerja yang akan mengurangi angka kemiskinan.

Pertumbuhan juga dapat dicapai melalui perbaikan pendapatan publik dan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk prasarana fisik dan sosial sehingga membantu mengurangi kemiskinan serta memperbaiki potensi produktif perekonomian. Semenjak tahun 2001 terjadi penyerahan wewenang keuangan kepada daerah. Daerah diberikan keluasaan untuk mengatur kebijakannya. Diharapkan dengan mengatur belanja rutin dan belanja pembangunan dapat menurunkan tingkat kemiskinan di setiap daerah. Belanja rutin pemerintah daerah dapat menurunkan tingkat kemiskinan di setiap daerah. Belanja rutin pemerintah dapat mendorong konsumsi di masyarakat sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan menurunkan tingkat kemiskinan.

Belanja modal digunakan untuk melaksanakan pembangunan di segala bidang, terutama pembangunan saran dan prasarana publik.

Pembangunan yang dilaksanakan diharapkan akan mendorong perkembangan perekonomian daerah dan pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Jika dihubungkan dengan kemiskinan diharapkan bahwa investasi publik dapat menurunkan tingkat kemiskinan. Investasi publik dalam bentuk pembangunan infrastruktur memberikan keuntungan kepada kaum miskin dengan tersedianya akses menuju pasar dan jasa-jasa sosial lainnya.

Pertumbuhan penduduk dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sisi permintaan dan penawaran. Dengan jumlah penduduk yang meningkat, maka akan meningkatkan konsumsi. Peningkatan konsumsi itu pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Penambahan jumlah penduduk berarti bertambahnya jumlah angkatan kerja akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Melalui tersedianya angkatan kerja ini, pertumbuhan penduduk diharapkan akan menurunkan kemiskinan.

Tingkat pengangguran dapat diartikan sebagai bagian dari penduduk yang belum atau tidak mempunyai pekerjaan. Dengan penduduk yang tidak mempunyai pekerjaan dapat diasumsikan maka dia tidak mempunyai penghasilan untuk mencukupi kebutuhan, terutama kebutuhan konsumsi. Dengan tingkat pengangguran yang meningkat, maka akan menurunkan konsumsi. Penurunan konsumsi akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dengan menurunkan jumlah pengangguran maka diharapkan dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Jenis dan Sumber Data

Sumber data utama untuk penelitian ini adalah laporan, Badan Pusat Statistik (BPS), *International Financial Statistik* (IFS) yang diterbitkan oleh *International Monetary Fund* (IMF) dan Bank Indonesia (Laporan Tahunan BI dan Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder mulai dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2008.

3. Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang dilakukan dengan studi pustaka (*library research*), maka data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan literature yang berkaitan dengan objek penelitian yang berupa dokumen atau arsip yang didapat dari Bank Indonesia, situs internet, sehingga tidak diperlukan tehnik sampling serta kuesioner.

4. Metode Analisis Data

Studi ini menggunakan analisis regresi sebagai alat pengolahan data. Analisis regresi adalah studi mengenai ketergantungan suatu variable dependen (tidak bebas) terhadap salah satu atau lebih variable independent (bebas atau penjelas) untuk mengestimasi dan atau meramalkan nilai-nilai populasi variable dependen berdasarkan nilai tetap variable independent.

Berdasarkan kerangka pikir analisis yang dibangun dalam penelitian ini, variabel-variabel yang digunakan adalah tingkat kemiskinan sebagai variabel yang dijelaskan (*dependen variabel*), sedangkan variabel yang menjelaskan (*explanatory variabels*) adalah pertumbuhan ekonomi, pengeluaran pemerintah, pengangguran.

Model umum yang akan dibangun dalam persamaan :

$$MIS = f(GDP, GE, UNE) \dots\dots\dots 1$$

Model umum tersebut selanjutnya dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut :

$$MIS = C(1) + C(2)*DUMMY*(GE) + C(3)*DUMMY*(GDP) + C(4)*DUMMY*(UNE) + C(5)*(GDP) + C(6)*(GE)+(7)*(UNE) \dots\dots\dots 2$$

Karena model ini mengaitkan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan, maka pendapat persamaan ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma dimana koefisien tiap variabel merupakan nilai elastisitas yang menggambarkan keterkaitan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan. Selanjutnya model dinamik menjadi:

$$\begin{aligned} \text{LOG(MIS)} = & C(1) + C(2)*\text{DUMMY}*(\text{LOG(GE)}) + \\ & C(3)*\text{DUMMY}*(\text{LOG(GDP)}) + \\ & C(4)*\text{DUMMY}*(\text{LOG(UNE)}) + C(5)*\text{LOG(GDP)} + \\ & C(6)*\text{LOG(GE)} + \\ & C(7)*\text{LOG(UNE)} \dots \dots \dots 3 \end{aligned}$$

Dimana :

- MIS : tingkat kemiskinan atau jumlah orang miskin di Indonesia
- GDP : jumlah GDP per tahun
- GE : jumlah pengeluaran pemerintah
- UNE : jumlah atau tingkat pengangguran per tahun

5. Hipotesis

Penelitian ini membahas pengaruh variabel independen yaitu pertumbuhan terhadap variabel dependen yaitu tingkat kemiskinan. Adapun faktor-faktor lain yang diidentifikasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi adalah pengeluaran pemerintah, dan pengangguran.

Untuk pengujian hipotesis selengkapnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. GDP diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_0 : \beta = 0$, artinya GDP tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan
 $H_1 : \beta \neq 0$, artinya GDP berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan
2. Pengeluaran pemerintah (GE) diduga mempunyai pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
 $H_0 : \beta = 0$, artinya GE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan
 $H_1 : \beta \neq 0$, artinya GE berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

3. Jumlah *Unemployment* (UNE) diduga mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

$H_0 : \beta = 0$, artinya UNE tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan

$H_1 : \beta \neq 0$, artinya UNE berpengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan

6. Tahapan Analisis Data.

6.1. Pengujian Ekonometri

Sebelum model diuji secara empiris, beberapa pengujian ekonometrik penting dilakukan yaitu:

Pengujian Otokorelasi

Asumsi dasar yang terdapat dalam metode regresi dengan kuadrat terkecil adalah tidak adanya korelasi antar gangguan (error). Masalah otokorelasi sering terjadi pada penelitian-penelitian deret waktu dimana eror yang berkaitan dengan observasi dalam periode waktu tertentu terbawa ke dalam periode-periode waktu yang akan datang. Otokorelasi tidak mempengaruhi ketidak biasan atau konsistensi penduga-penduga kuadrat terkecil biasa tetapi mempengaruhi efisiensi model. Varians estimasi parameter yang tidak efisien menyebabkan nilai t hitung cenderung kecil dan hasil pengujian cenderung menerima hipotesis nol.

Jika DW dihitung terletak pada interval 1 dan 5 maka model menunjukkan masalah otokorelasi, sedangkan apabila nilai DW dihitung terletak pada interval 3, atau mendekati nilai 2, maka model tidak mengalami masalah otokorelasi yang serius. Bila hasil DW hitung terletak pada interval 2 dan 4 maka hasil pengujian tidak simpulkan ada atau tidaknya masalah otokorelasi.

Pengujian Heterokedastisitas

Asumsi dasar lainnya dari metode regresi dengan kuadrat terkecil adalah varians dari setiap gangguan adalah konstan. Heterokedastisitas adalah keadaan dimana asumsi di atas tidak tercapai. Dampak adanya

heterokedastisitas adalah tidak efisiennya proses estimasi, sementara hasil estimasinya sendiri masih tetap konsisten dan tidak bias. Adanya masalah dengan heterokedastisitas akan mengakibatkan hasil uji t dan F dapat menjadi tidak berarti (tidak ada gunanya).

Uji heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan *Goldfeld Quandt Test* yakni dengan menggunakan nilai $\lambda = S2/S1$, dimana $S1$ dan $S2$ adalah jumlah residual squares dari regresi pertama dan kedua. Membandingkan nilai λ dengan nilai nilai kritis yang relevan dari distribusi F dan jika $F_{test} (= \lambda) < F_{table}$, maka tidak ada Heterokedastisitas, tetapi jika terdapat Heterokedastisitas, parameter tersebut menjadi tidak BLUE (*Best Linier Unbiased Estimator*).

Pengujian Multikolinieritas

Salah satu asumsi model regresi majemuk adalah tidak adanya hubungan linier yang persis antar variabel –variabel yang menjelaskan di dalam model. Jika hubungan linear itu ada, dikatakan bahwa variabel-variabel mempunyai masalah multikolinieritas. Indikasi terjadinya multikolinieritas antara lain tingginya R^2 , nilai uji F signifikan namun ada variabel yang secara parsial tidak signifikan (nilai uji t tidak signifikan), atau terdapat korelasi tinggi ($r >= 0,8$) antara satu atau lebih pasangan variabel bebas dalam model. Untuk mengatasi dan menghilangkan adanya multikolinieritas adalah dengan menyederhanakan model (mengurangi jumlah variabel bebas dengan melihat uji t yang tidak signifikan), mengubah bentuk atau dengan menambah observasi

6.2. Pengujian Signifikansi

Uji t

Uji t merupakan pengujian koefisien regresi secara terpisah atau parsial. Dengan menggunakan uji t setiap koefisien regresi akan dilihat satu persatu keabsahannya secara statistik t. Nilai t statistik diperoleh dengan menormalisasikan koefisien regresi terhadap standar deviasinya.

Jika nilai varians populasi bagi masing-masing B tidak diketahui dapat digunakan varians dari sample yang diperoleh dari matriks kovarians B. Nilai statistik tersebut akan dibandingkan dengan nilai t table dengan derajat bebas (N-1) pada tingkat keyakinan tertentu. Hipotesa nol yang menyatakan bahwa nilai koefisien B adalah sama dengan nol akan ditolak bila nilai t statistik lebih besar dari nilai table untuk tingkat keyakinan bersangkutan.

Uji F

Uji F adalah menyangkut keabsahan koefisien regresi secara keseluruhan. Pengujian yang melibatkan beberapa koefisien regresi secara bersama-sama ini dapat dilakukan dengan menggunakan distribusi F. Nilai F statistiknya diberikan sebagai berikut:

Nilai F statistik tersebut akan dibandingkan dengan F table dengan derajat bebas sebesar (N,(N-K-1)) pada tingkat keyakinan tertentu. Hipotesa nol pengujian menyatakan bahwa seluruh koefisien B adalah sama dengan nol, dan hipotesis alternatif menolak hal tersebut. Hipotesis nol akan ditolak apabila nilai F statistik yang diperoleh dari sample dari F tabel.

Pengujian dengan menggunakan distribusi F statistik disebut pula dengan test keseluruhan (overall test).

Uji R^2

Kriteria lain yang dapat pula digunakan untuk melihat apakah persamaan regresi dapat diandalkan adalah besar koefisien determinasi atau R^2 . koefisien determinasi menunjukkan besarnya persentase regresi yang dihasilkan. Besarnya R^2 adalah antara 0 dan 1. bila $R^2=0$, artinya variasi dari Y tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara $R^2=1$, artinya variasi dari 100% dapat diterangkan oleh X. dengan kata lain bila $R^2=1$ maka semua titik pengamatan berada pada garis regresi.

IV. Pembahasan

A. Gambaran Umum Kemiskinan di Indonesia

Indonesia adalah negara yang masih mengalami masalah kemiskinan akut. Hasil survei Media Indonesia terhadap 480 responden yang diambil secara acak dari daftar pemilik telepon enam kota besar di Indonesia (Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Medan, dan Makasar). Responden ditanya bagaimana pendapatannya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari saat ini, apakah dirasakan semakin berat atau ringan.

Mayoritas responden (73%) merasakan bahwa pemenuhan kebutuhan sehari-hari semakin berat; sebanyak 21% responden merasakan sama saja; dan hanya 6% yang merasakan semakin ringan. Ketika ditanya apakah sekarang ini mendapatkan pekerjaan baru dirasakan semakin sulit atau semakin mudah, sebagian besar responden (89%) merasakan sekarang semakin sulit mencari pekerjaan baru; sebanyak 5% responden merasakan sama saja; 4% merasakan semakin mudah; dan 2% merasakan tidak tahu.

Pada tahun 2007, jumlah penduduk miskin adalah 37,17 juta orang atau 16,58% dari persen dari total penduduk Indonesia sebanyak 39,30 juta atau sebesar 17,75% dari total penduduk Indonesia tahun tersebut. Meskipun terjadi penurunan sebesar 2,13 juta jiwa, secara absolut angka ini tetap saja besar dan melampaui keseluruhan jumlah penduduk Selandia Baru (4 juta), Australia (12 juta), dan Malaysia (25 juta).

Laporan *United Nations Development Programme (UNDP), Human Development Report 2007/2008*, memperlihatkan peringkat IPM Indonesia tahun 2007 berada di urutan 107 dari 177 negara. Selain semakin jauh tertinggal oleh Singapura (peringkat 25), Brunei Darussalam (30), Malaysia (63), Thailand (78) dan Filipina (90), peringkat Indonesia juga sudah terkejar oleh Vietnam (105) yang pada tahun 2006 berada pada peringkat 109. Tanpa perbaikan strategi pembangunan ekonomi dan sosial dan sosial secara mendasar, peringkat IPM Indonesia tidak menutup kemungkinan segera disusul Laos (130), Kamboja (131) dan Myanmar (132) di tahun-tahun mendatang¹⁰. Dengan demikian, rendahnya peringkat IPM Indonesia

¹⁰ Suhatono, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan manusia Indonesia masih berada pada tingkat bawah. Bahkan, karena indikator IPM pada hakekatnya merujuk pada konsep dasar *human capabilities*, dapat dikatakan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendasar saja ternyata masih ketar-ketir. Dengan kata lain, hidup berkecukupan di Indonesia masih berupa bayangan semata, karena hampir sebagian rakyat Indonesia masih belum bisa terbebas dari persoalan kemiskinan.

Indikator IPM menggambarkan tingkat kualitas hidup sekaligus kemampuan manusia Indonesia. Indikator angka harapan hidup menunjukkan dimensi umur panjang dan sehat; indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah memperlihatkan keluaran dari dimensi pengetahuan; dan indikator kemampuan daya beli mempresentasikan dimensi hidup layak.

B. Gambaran Tingkat Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

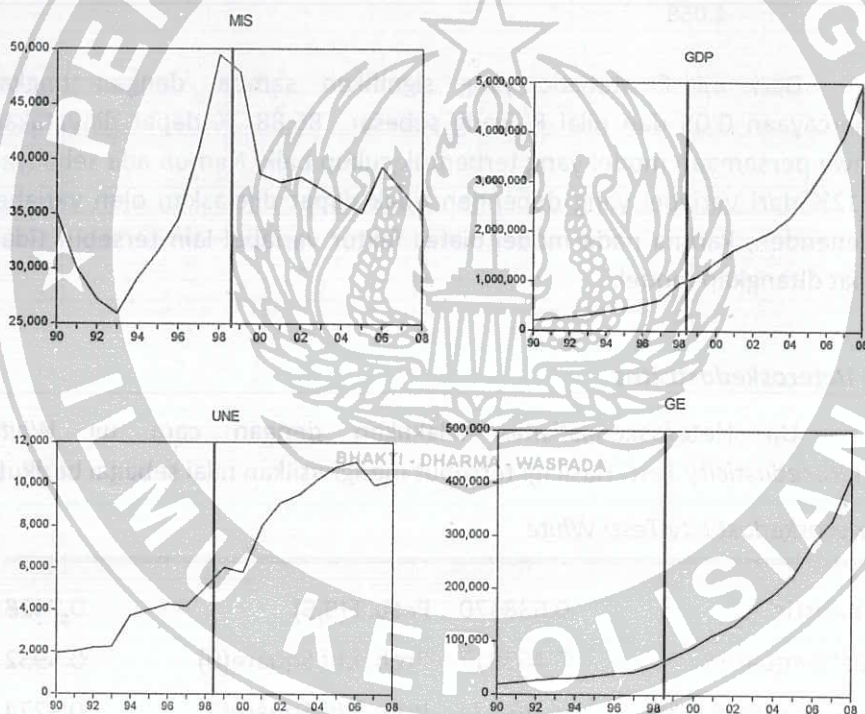
Semenjak orde baru pada awal tahun 1970, pemerintah Indonesia mengenalkan adanya Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I), dan PJPT II. Pembangunan jangka panjang juga dimasyarakatkan dengan nama (Repelita) Rencana Pembangunan Lima Tahun. Program ini menunjukkan keberhasilan, terutama dilihat dari indikator ekonomi makro ekonomi, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pertumbuhan pendapatan yang tinggi, tingkat inflasi yang rendah, kestabilan nilai tukar rupiah, rendahnya tingkat pengangguran dan perbaikan sarana perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang terus menurun hingga tahun 1996. Namun krisis ekonomi yang diawali tahun 1997 telah berdampak luas pada semua aspek kehidupan masyarakat, sehingga memicu instabilitas pada bidang sosial, politik dan keamanan. Kondisi ini memicu timbulnya kekacauan dalam kegiatan perekonomian dan laju inflasi yang semakin tinggi. Pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia negatif dan tingkat kemiskinan. Setelah tahun 2000 perekonomian mulai recovery sehingga pertumbuhan ekonomi mulai positif, sektor-sektor perekonomian yang sebelumnya tumbuh negatif, sudah berkembang menjadi positif. Diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 3-4% tetapi tingkat kemiskinan belum seperti

keadaan sebelum krisis ekonomi. Periode tahun 2001-2004 tingkat kemiskinan Indonesia berkisar antara 16-19%.¹¹

C. Analisis Regresi

1. Uji Spesifikasi

Sebelum dilakukan pengujian model, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan data dan melihat pola data. Pemeriksaan data dengan membuat grafik pergerakan jumlah orang miskin sebagai variabel terikat dan variabel-variabel bebas yaitu jumlah GDP, pengeluaran pemerintah (GE) dan pengangguran (UNE).



¹¹ BPS, 2008, *Indikator Makro Indonesia*, Juli 2008, BPS, Jakarta

Berdasarkan grafik diatas terlihat hubungan antara jumlah orang miskin (MIS) dengan GDP, dan belanja pemerintah (GE) serta pengangguran (UNE) cenderung linier. Hubungan antara GE, Unemployment serta GDP cenderung berlawanan arah dengan jumlah orang miskin.

Berdasarkan hasil persamaan diatas maka dapat dituliskan persamaan berikut:

$$\begin{aligned} \text{LOG(MIS)} = & 10.2408 + 2.38412 * \text{DUMMY} * (\text{LOG(GE)}) - 2.01776 * \text{DUMMY} * (\text{LOG(GDP)}) + \\ \text{t-stat} & \quad 8.456 \quad \quad 3.234 \quad \quad -3.148 \\ & 0.1892 * \text{DUMMY} * (\text{LOG(UNE)}) + 2.4711 * \text{LOG(GDP)} - 2.8616 * \text{LOG(GE)} - \\ & \quad 0.614 \quad \quad \quad 4.170 \quad \quad -4.355 \\ & 0.25061 * \text{LOG(UNE)} \\ & \quad -1.058 \end{aligned}$$

Dari uji F statistic yang signifikan sampai dengan tingkat kepercayaan 0.05 dan nilai R² yang sebesar 86.88 % dapat dinyatakan bahwa persamaan model yang terbentuk cukup baik. Namun ada sebanyak 13.12% dari variabel yang dependen tidak dapat dijelaskan oleh variabel independen, karena pada model diatas faktor variabel lain tersebut tidak dapat ditangkap model.

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan cara uji *White Heterocedasticity Test*. Hasil uji tersebut menghasilkan nilai sebagai berikut:

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0.638470	Prob. F(9,9)	0.7428
Obs*R-squared	7.403817	Prob. Chi-Square(9)	0.5952
Scaled explained SS	3.744382	Prob. Chi-Square(9)	0.9274

Hasil uji tersebut dengan P-value sama dengan 0.63874 menunjukkan bahwa H₀ yang menyatakan tidak ada Heteroskedastisitas (homoskedastisitas) pada residual diterima pada tingkat signifikansi 5%. Jadi dengan tingkat kepercayaan 95% pada data tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Otokorelasi

Nilai *Durbin Watson* (DW) dari persamaan adalah 1.222619. Sementara itu, untuk nilai $n=18$ dan $k=3$, untuk memperoleh nilai d_L dan d_U cukup sulit maka digunakan *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*.

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.834415	Prob. F(2,13)	0.4561
Obs*R-squared	2.161575	Prob. Chi-Square(2)	0.3393

H_0 tidak ada serial correlation. Dari hasil test ini P-value $0.834415 > 0.05$ maka terima H_0 . Dengan tingkat keyakinan 95% dapat disimpulkan bahwa tidak ada otokorelasi.

D. Analisis Regresi Persamaan

$$\text{LOG(MIS)} = 10.2408 + 2.38412 \cdot \text{DUMMY}(\text{LOG(GE)}) - 2.01776 \cdot \text{DUMMY}(\text{LOG(GDP)}) + 0.1892 \cdot \text{DUMMY}(\text{LOG(UNE)}) + 2.4711 \cdot \text{LOG(GDP)} - 2.8616 \cdot \text{LOG(GE)} - 0.25061 \cdot \text{LOG(UNE)}$$

t-stat	8.456	3.234		-3.148
	0.614		4.170	-4.355
	-1.058			

Model persamaan diatas dapat dibuat 2 bentuk persamaan yakni persamaan pada sebelum terjadinya krisis ekonomi dan setelah terjadinya krisis ekonomi.

Analisa Regresi Persamaan: Persamaan pada sebelum terjadinya krisis ekonomi dan setelah terjadinya krisis ekonomi.

a. Persamaan pada sebelum terjadinya krisis ekonomi yaitu :

$$\text{LOG(MIS)} = 10.2408 + 2.4711 \cdot \text{LOG(GDP)} - 2.8616 \cdot \text{LOG(GE)} - 0.2506 \cdot \text{LOG(UNE)}$$

Jika terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi sebesar 10% *ceteris paribus* maka tingkat pertumbuhan kemiskinan naik sebesar 24,71%. Jika terjadi

kenaikan dalam pengeluaran pemerintah sebesar 10% *ceteris paribus* maka tingkat kemiskinan akan berkurang sebesar 28,61%. Sedangkan variabel tingkat pengangguran tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

- b. Persamaan setelah terjadinya krisis ekonomi dapat ditulis sebagai berikut :

$$\text{LOG(MIS)} = 10.2408 + \{2.3841 - 2.861\} * \text{LOG(GE)} - \{2.0177 - 2.471\} * \text{LOG(GDP)}$$

Setelah dihitung hasil penjumlahan persamaan di atas adalah :

$$\text{LOG(MIS)} = 10.2408 - 0.4769 * \text{LOG(GE)} + 0.4553 * \text{LOG(GDP)}$$

Setelah terjadinya krisis ekonomi, maka kita dapat lihat hasil regresi. Secara keseluruhan hasil regresi sesudah krisis tidak terlalu beda hasilnya dengan setelah krisis, variabel pengeluaran pemerintah (GE) mempunyai hubungan yang negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan dan variabel pertumbuhan ekonomi (PDB) mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap peningkatan kemiskinan. Peningkatan pengeluaran pemerintah (GE) 10% *ceteris paribus* akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 4,76%. Jika terjadi kenaikan dalam pertumbuhan ekonomi (GDP) sebesar 10% *ceteris paribus* akan meningkatkan tingkat kemiskinan sebesar 4,55%. Sedangkan variabel tingkat pengangguran tidak dilakukan interpretasi dan analisis karena terbukti tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hasil regresi di atas menunjukkan hubungan antara pendapatan per kapita dan pengurangan kemiskinan menunjukkan hasil yang hampir sama sebelum dan sesudah krisis yaitu dengan jelas menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi atau pembangunan negara berkembang sama sekali tidak dapat menurunkan tingkat kemiskinan karena hal ini tidak menyentuh substansi dari permasalahan tersebut. Tingginya pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya GDP tidak selalu berarti terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat yang pada akhirnya menunjukkan bahwa peningkatan GDP di suatu negara tidak serta merta dapat menurunkan atau mengurangi tingkat kemiskinan.

Tabel 1. ASUMSI EKONOMI MAKRO 2005 - 2010

Tahun	Indikator Produk Domestik Bruto	
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Nominal (Miliar Rp)
2005-R	5,7	2.774.281,10
2006-R	5,5	3.339.216,80
2007-R	6,3	3.949.321,40
2008-R	6,1	4.954.028,90
2009-APBN	6	5.327.537,90
2009-RAPBN-P	4,3	5.425.404,70
2010-RAPBN	5	6.050.054,50

Sumber : Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Secara konseptual, setiap aktivitas ekonomi akan menghasilkan nilai tambah (*value added*)- nilai yang ditambahkan atas nilai bahan baku/ input antara-yang merupakan balas jasa faktor produksi, tenaga kerja, tanah, modal dan kewiraswastaan. Penjumlahan *value added* di suatu wilayah territorial (Indonesia) dan dalam selang waktu tertentu (triwulan, setahun) menghasilkan PDB wilayah tersebut. Dengan demikian, penguasaan faktor produksi menentukan kepemilikan nilai tambah. Selanjutnya, pertambahan riil PDB dalam triwulan/setahun dinamakan pertumbuhan ekonomi triwulan/tahun yang bersangkutan. Kata riil mengacu kepada PDB yang telah dihilangkan inflasinya sehingga pertumbuhan ekonomi sudah bersih dari pengaruh perubahan harga dan merupakan pertumbuhan jumlah kuantitas produk.

Namun yang menarik adalah berdasarkan hasil estimasi diatas bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini yang menurut penulis sejalan dengan keadaan di Indonesia sekarang, bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) tingkat berpengaruh bahkan cenderung berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung stabil dan meningkat seperti tabel dibawah ini ternyata tidak membawa dampak terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Indonesia secara signifikan.

Berdasarkan hasil estimasi diatas juga, penulis mencoba memaparkan sedikit realialitas yang ada menyangkut hubungan antara

tingkat pertumbuhan (PDB) dengan tingkat kemiskinan (MIS). Diantaranya adalah masalah penguasaan faktor produksi dan besaran kontribusi sektoral menjadi faktor nyata "melesetnya" interpretasi yang merugikan masyarakat, dan berikut ini diberikan uraian anomali seperti yang terjadi pada hasil regresi diatas akibat salah interpretasi.

Pertama, produksi pertambangan di Indonesia dengan kondisi faktor produksi tenaga kerja berpendapatan rendah, umumnya pelakunya adalah masyarakat Indonesia. Tenaga ahli, yang umumnya pendapatannya jauh lebih tinggi, adalah ekspatriat. Data sebuah perusahaan tambang untuk membayar tenaga ekspatriat berbanding terbalik dengan jumlah tenaga kerjanya. Jumlah ekspatriat sedikit sedangkan total nilai gaji dan tunjangannya besar.

Walaupun tanahnya milik Indonesia, dalam penggunaannya dikuasai asing. Demikian juga modalnya dari mereka sehingga walaupun dicatat di Indonesia, PDBnya lebih dinikmati mereka. Nilai tambah yang tercipta dan merupakan hak pekerja hanya bagian kecil, sebaliknya sebagian besar lainnya adalah milik penguasa faktor produksi. Pemerintah mendapat pajak dari aktivitas ekonomi ini, yang jumlah lebih kecil jika dibandingkan dengan milik asing. Dengan analogi itu, apabila pertumbuhan ekonomi terjadi karenanya, yang lebih "tumbuh" adalah asing. Bagaimana kalau banyak bisnis pertambangan di Indonesia semacam itu? Mungkin nantinya sumber daya habis, ternyata yang lebih menikmati adalah asing.

Kedua, perusahaan jasa, misalkan perbankan, mungkin lebih parah. Mereka melayani aktivitas ekonomi Indonesia, dan semua transaksi keuangan dalam perekonomian hampir pasti dikelola sektor tersebut. Kendatipun lokasi bisnis di Indonesia, dan kinerjanya dicatat dalam PDB negeri ini, karena sebagian besar faktor produksinya dimiliki dan dikuasai asing, nilai tambahnya sebagian besar juga dimiliki asing. Karena usaha jasa saat ini sarat dengan ICT (*Information-communication technology*), hanya sedikit tenaga kerja yang diserap. Bisnis jasa bukan hanya perbankan. Peran asing sudah mendominasi.

Ketiga, usaha besar jumlahnya sedikit, sebaliknya usaha kecil jumlahnya banyak. Usaha besar sering merupakan afiliasi asing yang operasionalisasinya sangat efisien, sedangkan usaha kecil masih menjadi perbincangan untuk didorong maju. Ritel modern yang berjangkauan luas,

efesien dan diizinkan masuk ke daerah kecil didapungkan dengan ritel tradisional yang sering berpenampilan kumuh dan kurang menarik pengunjung. Hasilnya adalah yang besar tumbuh besar dan yang kecil semakin kecil. Padahal kontribusi ritel besar memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDB, sedangkan ritel-ritel kecil, kendatipun berjumlah banyak tetapi memiliki kontribusi yang kecil terhadap PDB. Dengan demikian, apabila sektor perdagangan tumbuh, secara matematis lebih menggambarkan keterjepitan pasar tradisional.

Kelima, bisnis kuliner yang terbentuk waralaba memang sebagian besar faktor produksinya dikuasai oleh bangsa Indonesia. PDB yang tercipta lebih banyak menguntungkan Indonesia. Namun, bukan berarti secara "bersih" dinikmati Indonesia. Fee waralaba asing akan mengalir ke luar dan terkagetorikan sebagai kebocoran ekonomi Indonesia.

Dengan uraian diatas anomali pertumbuhan ekonomi tersebut, jelaslah bahwa pertumbuhan ekonomi semacam itu bukanlah sesuatu hal yang patut dibanggakan. Gambaran tersebut lebih menunjukkan pertumbuhan yang tidak berkualitas yang berdampak bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mampu mengurangi kemiskinan bahkan berdasarkan hasil regresi diatas bahwa pertumbuhan ekonomi menghasilkan atau mendorong terjadi pertumbuhan tingkat kemiskinan di Indonesia. Bahkan kebijakan yang didasarkan pertumbuhan ekonomi seperti itu sangat mungkin merugikan, dan sasaran yang dibidik tidak tercapai.

Hasil analisis regresi hubungan pertumbuhan ekonomi yang tidak signifikan terhadap pengurangan kemiskinan sejalan dengan pendapat Ketua Badan Anggaran DPR, Harry Azhar Aziz, dalam diskusi yang digelar *Center for Information dan Development Studies (CIDES)* di Jakarta, yang menyatakan bahwa selama ini kemiskinan tidak berhubungan dengan angka pertumbuhan ekonomi. Kegagalan ini disebabkan kegagalan mengaitkan angka makro ekonomi dengan kondisi riil masyarakat.

Sementara itu berdasarkan hasil analisis regresi diatas baik sebelum dan sesudah krisis menunjukkan hal yang sama bahwa *Belanja pemerintah (GE)* berdampak negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Ini berarti bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat mengurangi tingkat kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Hal ini berdampak

bahwa pemerintah harus lebih serius dalam membuat kebijakan pengeluaran anggaran untuk lebih pro rakyat.

Hal ini harus menyentuh reformulasi dan realokasi anggaran pemerintah bagi system pendistribusian yang lebih memperhatikan karakteristik dan kebutuhan agar tepat sasaran. Alokasi sumber anggaran menuju *pro poor*. Mencakup anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk jaminan social (bantuan social dan asuransi soaial), pendidikan, kesehatan dan berbagai kebijakan lain yang dapat menstimulus dan memberdayakan masyarakat miskin.

Permasalahan kebijakan yang pro rakyat bisa dikaji dari rendahnya komitmen dan keberpihakan para perumus kebijakan dan penyelenggara negara. Di Indonesia masih banyak kebijakan publik yang memihak orang kaya (*pro-rich*), ketimbang memihak orang miskin (*pro-poor*). Padahal, sebagai sebuah perangkat pemerintahan yang penting, kebijakan public seharusnya lebih memihak orang miskin ketimbang orang kaya. Selain karena jumlah orang miskin di Indonesia sangat besar, orang kaya memiliki sumber daya untuk menolong dirinya sendiri. Mereka memiliki kemampuan yang lebih besar dan pilihan yang lebih luas ketimbang orang miskin.

Kebijakan BLBI, penghematan BBM, pertanian dan bahan pokok masih terkesan memihak orang kaya. Sementara itu jika dilihat situasi sekarang maka pemerintah perlu membuat program yang lebih lagi untuk membuat anggaran yang pro rakyat untuk mencegah meningkatnya jumlah orang miskin di Indonesia. Terlepas dari kebijakan yang belum banyak *pro-rakyat*, pemerintah telah melakukan langkah awal melakukan kebijakan anggaran yang pro rakyat. Diantaranya adalah kebijakan anggaran pendidikan yang seusai dengan UUD 1945 yang mewajibkan 20% dari APBN, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang di tujukan bagi rakyat miskin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang dikembangkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Yang dari berbagai kebijakan diatas mampu terbukti berpihak kepada rakyat terutama rakyat miskin, namun ke depan kebijakan *pro-poor* harus lebih ditingkatkan dan dikembangkan.

V. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang dapat diambil kesimpulan antara lain:

1. Faktor-faktor yang diperkirakan mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia berdasarkan hasil estimasi adalah tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP), pengeluaran pemerintah (GE) sementara itu tingkat pengangguran (UNE) tidak signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.
2. Hasil estimasi regresi maka didapatkan hasil bahwa sebelum dan sesudah krisis menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi (GDP) berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan (MIS), sedangkan pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negative terhadap tingkat kemiskinan.
3. Berdasarkan hasil estimasi diatas pengeluaran pemerintah (GE) berpengaruh negative dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pengeluaran yang lebih *pro-poor* agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia.

B. Rekomendasi

Kesimpulan diatas, penulis memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Berdasarkan penelitian ini, pemerintah dalam usahanya menurunkan kemiskinan dapat menggunakan strategi peningkatan pengeluaran pemerintah (GE) terutama yang pengeluaran yang berpihak kepada kaum miskin.
2. Pemerintah perlu melakukan evaluasi terhadap kebijakan pertumbuhan ekonomi (PDB) karena terbukti pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh mengurangi jumlah orang miskin, bahkan berdampak positif terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Apakah kebijakan pertumbuhan ekonomi telah disertai dengan pemertaan dan menyentuh keberpihakan terhadap substansi permasalahan dari kemiskinan itu sendiri.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik, 1990-2009, *Statistik Indonesia*, BPS, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Indikator Makro Indonesia*, Juli 2008, BPS, Jakarta
- Basri, Faisal, 2002, *Perekonomian Indonesia-Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Indonesia*, Erlangga, Jakarta
- BPS-Statistic, Bappenas, UNDP (2001), *Indonesia Human Development Report, 2001(Towards a New Consensus: Democracy and Human Development Indonesia)*, Jakarta: BPS-Stistics, Bappenas, UNDP.
- Cahyat, Ade, 2000, *Bagaimana Kemiskinan Diukur (Beberapa Model Penghitungan Kemiskinan di Indonesia)*, Center for International Forestry Research
- Datt, Gaurau, Martin Ravallian, 2002, *Is India's Economics is Leaving The Poor Behind*, Journal of Economics Prospective.
- Dollar, David, Aast Kraay, 2002, *Growth is Good for the poor*, Journal of Economics Growth.
- Gujarati, Damodar N, 2003, *Basic Econometric*, International Edition, Fourth Edition, Mc. Graw Hill, New York.
- Kuncoro, Mudrajad, 2003, *Ekonomi Pembangunan-Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Edisi Ketiga, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta
- Media Indonesia (2004), 24 Januari, Anomali Pertumbuhan Ekonomi
- Nachrawi Jalal, Harius Usman, 2002, *Penggunaan Teknik Ekonometri*, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta.
- Ray, Debraj, 1998, *Development Economics*, Princeting University Press", New Jersey.
- Republika (2010), *Kesejahteraan Rakyat Belum Optimal*, dalam Republika, 6 April 2010.
- Suhatono, Edi, 2006, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama

- Sumanta, Jaka, 2005, *Fenomena Lingkaran Kemiskinan Indonesia-Analisis Ekonometri Regional Data Panel Propinsi tahun 1999-2002*, Tesis Magister Perencana dan Kebijakan Publik, UI, Depok
- Tambunan, Mangara, 2006, *Perkembangan Teori Pertumbuhan*, Bahan Kuliah Ekonomi Pembangunan, Program Paskasarjana Ilmu Ekonomi, Universitas Indonesia, Depok.
- Todaro, M.P, 2000, *Economic Development*, Six Edition, Harlow:Addison-Wesley
- United Nations Development Programe (2007), *Human Development Report 2007/2008: Fighting Climate Change, Human Solidarity in a Devided World*, New York: Palgrace Mcmillan.

